

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI DESA
SIDODADI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Prodi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH :

Mala Antika

NIM. 44.14.3.002

Program Studi Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2017**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI DESA
SIDODADI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG**

Oleh:

MALA ANTIKA
NIM 44143002

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Diujikan Dalam Sidang

Munaqasyah Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi

Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, 5 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

SUHERI HARAHAHAP, M.Si
NIP. 1972101 199803 1 003

Dr. ZULKARNAEN, M.Ag
NIP. 19740111 200312 1 006

SURAT PERNYATAAN

Kami pembimbing I dan pembimbing II yang di tugaskan untuk membimbing Skripsi dari Mahasiswa, yaitu :

Nama : Mala Antika
Nim : 44.14.3.002
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang

Berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya dapat di munaqasyahkan.

Medan, 5 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

SUHERI HARAHAHAP, M.Si
NIP. 1972101 199803 1 003

Dr. ZULKARNAEN, M.Ag
NIP. 19740111 200312 1 006

Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang” an. Mala Antika, NIM. 44143002 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 30 Oktober 2018.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 30 Oktober 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Sarjana (S.1)

Fakultas Ushuluddin dan Studi

Islam UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Drs. Muhammad Aswin, M. Ap
NIP. 196808172003121003

Muhammad Hidayat, MA
NIP. 197702132007101001

Anggota Penguji

1. Suheri Harahap, M.Si
NIP. 1972101 199803 1 003

2. Dr. Zulkarnaen, M.Ag
NIP. 19740111 200312 1 006

3. JUNAIDI, M.Si
NIP. 198101022009121009

4. Muhammad Hidayat, MA
NIP. 197702132007101001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Studi Islam
UIN Sumatera Utara

Prof. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705199032003

SURAT PERNYATAAN

Nama : Mala Antika
Nim : 44.14.3.002
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Semester : IX (Sembilan)
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 15 Januari 1995
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Pengilar Gg. Pengilar V No. 5B Amplas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi berjudul
**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI DESA
SIDODADI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG”**,
benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 5 November 2018
Yang Membuat Pernyataan,

MALA ANTIKA
NIM. 44.14.3.002

ABSTRAK



Nama : Mala Antika
Nim : 44.14.3.002
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Islam
Judul Skripsi : **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang”**
Pembimbing I : Suheri Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Zulkarnain, M.Ag

Adapun ketertarikan penulis terhadap judul di atas, karena penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah terhadap industri yang sedang berkembang di Desa Sidodadi, khususnya kepada industri kerupuk opak.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau di sebut dengan metode kualitatif deskriptif, yang nantinya akan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi, sehingga dapat di temukan sebuah kesimpulan.

Adapun temuan dari Skripsi ini adalah bahwa metode pengembangan idnustri kerupuk opak di Desa Sidodadi dengan memasarkan berbagai inovasi produk kerupuk opak. Unsur yang menghambat pada pengembangan industri tersebut adalah modal yang kurang, kurangnya bahan baku, dan kurangnya kerja sama pemilik isdustri terhadap pemerintah pada dahulunya, sehingga dari 5 (lima) industri opak yang berdiri dahulunya, 2 (dua) diantaranya sudah bangkrut. Maka dengan adanya kejadian yang menimbulkan turunnya perekonomian di Desa Sidodadi, perlu adanya pemerintah dan perhatian yang lebih untuk memberikan kontribusi terhadap industry yang ada. Dan adapun kebijakan pemerintah tersebut adalah perlunya pemilik industri untuk melengkapi syarat-sayarat mendirikan sebuah UMKM, adanya bantuan modal yang diberikan terhadap industri, memberikan pelatihan metode pemasaran terhadap para karyawan guna untuk meningkatkan penjualan, dan bantuan pemerintah dan lembaga lain dalam hal pemerian bantuan alat produksi untuk meningkatkan produksi kerupuk opak.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengembangan, Pemerintah, Industri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu kiranya Shalawat dan Salam semoga tetap di limpahkan kepada utusanNya, yakni Nabi Muhammad Saw yang merupakan suri tauladan bagi seluruh Ummat Muslimin dan Muslimat sampai Hari Akhir kelak.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu Skripsi yang di persiapkan menjelang Sidang Munaqasyah. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI DESA SIDODADI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG”**.

Dalam rangka penyelesaian Skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak kesulitan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun penulis juga menyadari berkat kerja keras, dan kerja sama, serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikit pun dari penulis kecuali laporan akhir (Skripsi) ini bisa bermanfaat, yaitu memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk menyongsong era masa depan yang lebih baik, kondusif dan lebih memberikan nilai konstruktif. Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpulkan dan menganalisisnya demi terciptanya sebuah Skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal-hal yang kurang pas dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan teguran, saran, dan kritik yang konstruktif sifatnya untuk kesempurnaan Skripsi ini sebagaimana yang di harapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini agar lebih spesifik penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Ibu Rudiah yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberi bantuan baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan juga kepada Bapak Sumardi Suwirio selaku ayah penulis, yang juga telah membantu penulis berupa materil dan juga sebagai suri tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Suheri Harahap M.Si selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Zulkarnain, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga menjadi sebuah Skripsi. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. M. Aswin, M.Ap selaku Kepala Prodi Pemikiran Politik Islam, dan dosen-dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan kontribusi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini.

Dan penulis ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman, serta sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendukung penulis dalam menjalani masa perkuliahan di Universitas ini., yaitu :

1. Nela Fauza Pohan
2. Suci Rahmadani
3. Nuraini
4. Vivi Arvianti
5. Adri Bukhari
6. Fachri Pradana
7. Rizqan Arief
8. Ismed Alfadli Sirait, dan segenap teman-teman satu stambuk penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kepada penulis khususnya. Semoga Allah Swt berkenan menilainya sebagai amal usaha yang positif. Amin. Wassalam.

Medan, 5 November 2018

Penulis,

MALA ANTIKA
NIM. 44.14.3.002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Istilah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB. II. MENGENAL KEADAAN MASYARAKAT DESA SIDODADI	
A. Geografi	13
B. Demografi	15
C. Pendidikan	20
D. Agama Dan Kebudayaan	24
BAB. III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	
A. Kebijakan Pemerintah	30
B. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	43
C. Peraturan Pemerintah Terhadap Izin Mendirikan Industri (UMKM)	49
D. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM	57
BAB. IV. ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KERUPUK OPAK DI DESA SIDODADI	
A. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kerupuk Opak	61

B. Struktur Organisasi.....	68
C. Persaingan Dengan Pasar Tradisional.....	71
D. Faktor-faktor Penghambat Pemasaran Usaha Industri Kecil dan Menengah Kerupuk Opak.....	72
E. Analisis.....	76

BAB. V.PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	85

DAFTAR

PUSTAKA.....	86
---------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan investasi skala yang selama beberapa dekade mampu menopang perekonomian Indonesia yang kolaps. Keadaan tersebut memicu terjadinya krisis ekonomi yang diikuti berbagai permasalahan dalam negeri yang semakin kompleks. Pemerintah pusat berupaya menanggulangi dampak negatif dari kondisi tersebut dengan membuat dan memberlakukan beberapa kebijakan dan peraturan baru salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menggali setiap potensi yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah adalah upaya menuju kemandirian daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan membiayai pembangunan dalam upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas dengan melibatkan masyarakat.¹

Peran usaha kecil dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak dapat diabaikan begitu saja, karena selama ini usaha kecil telah mampu

¹ <http://www.depkop.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Juli pukul 14.05 WIB.

memberikan kontribusi sebesar 55% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor perdagangan, transportasi, dan industri kecil, melalui usaha pakaian jadi (*garment*) dan barang-barang kerajinan, termasuk mebel, ternyata berperan sebagai penghasil devisa negara. Oleh karena itu, pengembangan usaha kecil dirasakan cukup penting mengingat sampai 25 tahun mendatang, kemampuan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian, jasa, dan industri besar masih sangat terbatas.²

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ia menyampaikan sebuah hadits dari Rasulullah Saw.

فِي الْوَقْعِ ، فَإِنَّ الْكَافِرِينَ ، إِذَا فَعَلُوا شَيْئًا حَسَنًا ، يَتِمُّ إِعْطَائُهُمْ طَعَامًا
شَهِيًا فِي الْعَالَمِ. فِي حِينَ أَنْ مَنْ يُؤْمِنُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ لَهُ الْخَيْرَ فِي
الْآخِرَةِ وَيُعْطِيهِ الرِّزْقَ فِي الْعَالَمِ حَسَبَ طَاعَتِهِ لِلَّهِ.

Artinya: “Sesungguhnya orang kafir, bila mengerjakan suatu kebaikan, diberikan sebuah kelezatan di dunia. Sedangkan orang yang beriman, maka Allah menyimpan untuknya kebaikan-kebaikannya di akhirat dan memberi rizki kepadanya di dunia sesuai dengan ketaatannya kepada Allah”. (H.R. Abu Daud).³

Dari kajian para ulama dapat dirumuskan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi ini. Islam tidak menyukai kemiskinan, bahkan Nabi Muhammad Saw telah memperingatkan bahaya kefakiran yang dapat mengantarkan seseorang

²Hetifah Sjaifudian dan Erna Ermawati Chotium, *Dimensi Strategi Pengembangan Usaha Kecil*, (Bandung : Yayasan Akatiga, 1994), h. 1.

³ Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), h. 147

kepada kekufuran dan mengajarkan ummatNya untuk berlindung dari 2 (dua) hal tersebut.

Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata, material dan spritual. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yakni dalam bidang ekonomi diantaranya sektor industri.⁴

Ada pun firman Allah sebagai berikut:

يَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ۖ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا يَجْرِمَنَّ مَنكُم
شَذَانٌ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ الْعَدْلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Ma'idah, 5: 8)⁵

Dalam sektor industri, pemerintah menitik beratkan pembangunan industri untuk memperluas lapangan kerja, menghasilkan barang-barang yang diperlukan

⁴Rachmawan Budiarto, Dkk, *Pengembangan UMKM : Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), h. 2.

⁵ Mahmud Junus, *Tarjamah Alquran Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), h. 98

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan devisa melalui ekspor hasil industri. Pembangunan itu telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, namun masih ditemukan masalah, yakni perhatian pemerintah masih mengutamakan industri besar dan menengah dibandingkan dengan industri kecil. Padahal industri kecil banyak menyerap tenaga kerja dan mengalami peningkatan jumlah unit. Perkembangan industri ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini juga tidak terlepas dari ketersediaan faktor-faktor industri yang mencakup energi, modal, bahan mentah/bahan baku, tenaga kerja, pengangkutan (transportasi) dan pemasaran.

Keadaan industri di Sumatera Utara terdiri dari industri kerupuk, kerupuk opak, keripik ubi, keramik gerabah, sepatu, kerajinan rotan, batu bata, ulos, makanan ringan, minuman, sapu ijuk, dan lain sebagainya. Industri-industri ini menyebar di beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Deli Serdang. Diantara industri kecil di Kabupaten Deli Serdang adalah kerupuk opak yang berada di Kecamatan Biru-Biru Desa Sidodadi. Dimana kerupuk opak telah banyak digemari oleh kaum Ibu-ibu, Bapak-bapak dan Anak-anak. Industri kecil kerupuk opak yang berada di Desa Sidodadi tersebut pada mulanya merupakan mata pencaharian tambahan, namun seiring perkembangan zaman, kerupuk opak semakin sedikit peminatnya karena bermunculannya industri kecil lainnya, sehingga para industri tersebut harus bersaing secara ketat.

Keberadaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan fungsinya mengutamakan kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber

daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya dituntut adanya inovasi, kreativitas, spirit enterprenur serta lebih responsif terhadap kepentingan publik. Dengan demikian jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Tabel I
Potensi Industri di Kabupaten Deli Serdang

No.	Uraian	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Industri Besar	219	7.027	624.909.963	275.227.450
2	Industri Menengah	659	96.605	538.922.682	400.597.055
3	Industri Kecil Formal	2.077	28.337	65.257.163	348.550.597
4	Industri Kecil Non Formal	9.442	29.104	2.078.528	481.542.000
Total		12.397	161.073	1.231.168.336	150.5917.102

Sumber : Data Statistik Kabupaten Deli Serdang 2016.⁶

Dari tabel I di atas, bahwa potensi industri besar lebih sedikit jumlah unit usahanya, yakni 219 (dua ratus sembilan belas) dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 7.027 (tujuh ribu dua puluh tujuh). Sedangkan industri menengah lebih banyak dari industri besar, jumlah unit usaha yakni 659 (enam ratus lima puluh sembilan) dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 96.605 (sembilan puluh enam ribu enam ratus lima). Sedangkan industri kecil formal lebih banyak dari industri besar dan industri menengah, jumlah unit usaha yakni 2.077 (dua ribu tujuh puluh tujuh) dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.337 (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh). Dan industri kecil non formal lebih banyak dari industri besar, industri menengah, dan industri kecil formal jumlah unit usaha yakni 9.442 (sembilan ribu empat ratus empat puluh dua) dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 29.104 (dua puluh sembilan ribu seratus empat).⁷ Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada dasarnya industri kecil tersebut memiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat dan tentunya dapat menjadi sebuah lapangan pekerjaan,

Terkait dengan industri kecil, pada paragraph sebelumnya terdapat 1 (satu) ragamnya yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru, yaitu industri opak. Awal mulanya industri ini hanya dijadikan sebagai penunjang ekonomi masyarakat setempat, namun seiring berkembangnya unit industri tersebut, terdapat sebahagian kalangan yang menjadikannya sebagai sumber

⁶ Data Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016

⁷ http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pek_0607190_chapter.pdf diunduh 15 Juli pukul 14.45 WIB.

perekonomian mereka, sehingga berdirilah 5 (lima) industri opak di Desa Sidodadi. Namun mendengar dari beberapa wacana masyarakat setempat, terdapat 2 (dua) industri opak diantaranya kolep dan tidak mendistribusikan produknya lagi.

Dari hasil wawancara yang didapati, penulis mendengar bahwa tutupnya ke-2 (dua) industri opak tersebut dikarenakan kurangnya bahan baku yang disebabkan oleh minimnya lahan untuk menanam ubi sebagai bahan baku pembuatan opaknya. Kejadian semacam ini merupakan sebuah kejadian yang berdampak menurunkan pembangunan perekonomian masyarakat setempat, sebab ketidak mampuan pemilik industri untuk menampung para pekerja. Dalam hal ini diperlukannya peran pemerintah setempat untuk menangani tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi permasalahannya yaitu, kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri kecil sehingga menyerap faktor-faktor industri mencakup energi, modal baik yang mencakup modal operasional untuk membeli bahan baku dan bahan penolong, bahan mentah/bahan baku yakni ubi kayu yang terkadang harga naik turun sehingga silih berganti petani menanam ubi kayu menjadi tumbuhan yang mudah di peroleh dengan menghasilkan harga yang cocok, tenaga kerja yakni jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri kecil kerupuk opak menurun, pengangkutan (transportasi) yakni alat yang digunakan untuk mengangkut bahan baku, bahan penolong dan pemasaran yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung

yang pada akhirnya akan menentukan pendapatan pengusaha dan pendapatan pekerjaan Industri Kecil Kerupuk Opak di Kecamatan Biru-Biru Desa Sidodadi Kabupaten Deli Serdang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Desa Sidodadi?
2. Bagaimana pengembangan industri kecil kerupuk opak di Desa Sidodadi?
3. Bagaimana persaingan industri kecil dan menengah (UMKM) di Desa Sidodadi dengan pasar tradisional?

D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi; suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁸
2. Kebijakan; kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2 rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi KE-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 131

maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.⁹

3. Pemerintah; sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹⁰
4. Industri; kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.¹¹
5. Desa Sidodadi; sebuah desa yang letaknya berada di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengembangan industri kecil kerupuk opak di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

⁹ *Ibid*, h. 278

¹⁰ *Ibid*, h. 639

¹¹ *Ibid*, h. 152

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pengambilan kebijakan pengembangan industri kecil kerupuk Opak di Desa Sidodadi.
2. Mengetahui atas perkembangan industri kecil kerupuk opak di Desa Sidodadi.
3. Menambah pengetahuan dan khazanah ilmu bagi penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu ingin mendeskripsikan dan menemukan makna serta pemahaman mendalam atas permasalahan berdasarkan perkembangan industri kecil dan menengah yang berada di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang pada saat ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat deskriptif, yang dimana deskriptif akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Peneliti mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Deli Serdang dengan maksud memahami realita yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Observasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Caranya dengan mendatangi langsung Sentra Industri Kecil yang berada di Kabupaten Deli Serdang khususnya di Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa.

b. Wawancara (*In Depth Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan. Penulis melakukan wawancara langsung ke pemilik industri kecil dan beberapa pekerja (karyawan), sehingga penulis mengetahui langsung apa yang penulis ingin ketahui.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan obyek-obyek penelitian yang diperoleh melalui catatan-catatan, berkas-berkas, ataupun dokumen yang berkaitan dengan Industri kecil dan menengah. Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari Pemilik Industri, buku-buku, dan hasil wawancara dan hal-hal yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang dikumpulkan selama penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis data *kualitatif-deskriptif* yang dikembangkan

oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data berlangsung secara berkesinambungan dimana setelah data terkumpul dengan baik dan sesuai dengan permasalahan langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini diuraikan dengan sistematika yang terdiri dari 5 Bab. Adapun penguraian mengenai ke-5 Bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Mengenal Masyarakat Desa Sidodadi yang menguraikan tentang Geografi, Demografi, Pendidikan, dan Agama dan Kebudayaan.

Bab III. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang menguraikan tentang Kebijakan, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Terhadap Izin Mendirikan Industri (UMKM).

Bab IV. Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Industri Kecil dan Menengah Kerupuk Opak di Desa Sidodadi yang menguraikan tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kerupuk Opak, Struktur Organisasi, Faktor-Faktor Penghambat Pemasaran Usaha Industri Kerupuk Opak, dan Analisis.

Bab V. Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

MENGENAL KEADAAN MASYARAKAT DESA SIDODADI

A. Geografi

Pada Bab II ini penulis akan menguraikan tentang geografi Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Pada pembahasan mengenai geografi Desa Sidodadi yang di cantumkan di bab II skripsi ini, penulis menguraikan tentang keadaan wilayahnya, penduduknya, dan perumahannya, sesuai dan sangat sinkron dengan pengertian dari geografi itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak KAUR Pemerintahan Kantor Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru pada tanggal 02 Oktober 2018 diperoleh penjelasan bahwa Desa Sidodadi merupakan kota perjuangan, yang mana salah satu pejuang yang terlahir adalah seorang Jenderal yang bernama Abdul Manaf Lubis sebagai Panglima di Sumatera Utara. Pada tahun 1.947 laskar yang ada di Desa Sidodadi dengan bumi hanguskan Desa Sidodadi dengan maksud dan tujuan agar tidak ada lagi penduduk Warga Negara Asing (WNA), seperti orang-orang Belanda yang tinggal di Desa Sidodadi, setelah itu laskar melarikan diri ke Perbaungan.

Desa Sidodadi memiliki batas-batas daerah sebagai berikut²³ :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selamat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidumolyo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarilaba Jahe.

²³Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sena.

Posisi Desa Sidodadi terletak di pusat pemerintahan Kecamatan Biru-Biru dan lebih kurang 67 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan berada sekitar 15 km dari Kota Medan.

Secara keseluruhan Desa Sidodadi memiliki luas wilayah kurang lebih 89 Ha. Lahan Desa secara umum dipakai sebagai sarana pemukiman, dan sarana umum, namun diantara sebagian lahan tersebut masyarakat juga memanfaatkannya sebagai sarana pertanian, dan perkebunan, seperti bercocok tanam ubi dan juga jagung.²⁴

Desa Sidodadi terbagi kedalam 11 (sebelas) dusun antara lain. Dusun-dusun yang ada di desa terletak di sisi kiri dan kanan jalan-jalan utama desa. Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan (kepling). Pemukiman penduduk Desa Sidodadi menyebar di seluruh wilayah desa. Sesuai dengan data statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi tahun 2016, menurut pendayagunaan areal pedesaan dan pembagian daerah di Desa Sidodadi dibagi kepada beberapa kategori seperti yang telah dijelaskan penulis akan dipaparkan pada tabel berikut ini.²⁵

Tabel II

Pendayagunaan Tanah Di Desa Sidodadi

²⁴Mulyana, *Wawancara Pendayagunaan Wilayah Desa Sidodadi*, (Sidodadi : 02 Oktober 2018), Pukul, 14:17 WIB.

²⁵Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

No.	Jenis Pendayagunaan	Luas/Ha
1	Pemukiman	39 Ha
2	Pertanian / Perkebunan	18 Ha
3	Ladang /Tegalan	8 Ha
4	Hutan	0 Ha
5	Rawa-rawa	0 Ha
6	Perkantoran	2 Ha
7	Sekolah	12 Ha
8	Jalan	10 Ha
9	Lapangan sepak bola	0 Ha
10	Total	89 Ha

Sumber Data : Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pendayagunaan tanah di Desa Sidodadi sangat baik untuk pertanian atau perkebunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel I bahwa setelah lahan pemukiman masyarakat, pendayagunaan yang lebih luas dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sidodadi adalah lahan pertanian/perkebunan, sebab keadaan tanah di Desa Sidodadi bersifat gembur dan subur, oleh karena itu sebagian dari masyarakat banyak yang memanfaatkan kondisi tanah sebagai lahan bertani dan berkebun, guna mencari penghasilan tambahan disamping mereka juga bekerja sebagai karyawan ataupun pegawai negeri maupun swasta.

B. Demografi

Tentang keadaan demografi, khususnya Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru dapat dilihat dari sisi baik dari segi latar belakang etnis, agama, ekonomi, serta pendidikan penduduknya. Menurut penjelasan KAUR Pemerintahan Desa Sidodadi, sejak desa tersebut dihuni oleh masyarakat pada tahun 1.947 sampai saat ini telah banyak mengalami peningkatan dinamika kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kehidupan beragama, maupun sosial budaya lainnya.

Pada awalnya, Desa Sidodadi ini dihuni oleh Suku Melayu dan Jawa yang datang dari luar daerah Desa Sidodadi, seperti Kota Madya Medan, Karena mereka melihat bahwa Desa Sidodadi merupakan tempat yang baik untuk mengambil hasil buminya, selanjutnya akan dijual ke luar Desa yang lain, kemudian mereka juga menganggap bahwa Desa ini merupakan lahan yang strategis untuk melakukan transaksi jual beli, oleh sebab itu sampai saat ini kebanyakan dari penduduk awal desa ini berprofesi sebagai wiraswasta.²⁶

Mengenai suku bangsa yang bermukim di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru, sampai saat ini ada beberapa suku, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.²⁷

Tabel III
Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Dilihat Dari Sukunya

No.	Nama Suku Bangsa	Jumlah
1	Jawa	2.287 Jiwa
2	Melayu	89 Jiwa

²⁶Mulyana, *Wawancara Tentang Penduduk Awal Desa Sidodadi*, (Sidodadi : 02 Oktober 2018), Pukul, 14:21 WIB.

²⁷Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

3	Batak	1.4294 Jiwa
4	Aceh	88 Jiwa
5	Minang	768 Jiwa
6	Total	4.623 Jiwa

Sumber Data : Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas, maka suku bangsa yang terbanyak di Desa Sidodadi adalah Suku Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 2.287 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah Etnis Melayu dan Minang.

Tabel IV

Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Dilihat Dari Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.774 Jiwa
2	Perempuan	1.849 Jiwa
3	Total	4.623 Jiwa

Sumber Data : Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

Berdasarkan data statistik pada tabel II bahwasannya jumlah penduduk di Desa Sidodadi adalah 4.623 jiwa, namun bila dibandingkan dengan luas wilayahnya yang berukuran 89 Ha, maka daerah ini termasuk wilayah yang berstatus penduduknya kurang padat.²⁸

²⁸Mulyana, *Wawancara Tentang Penanggulangan Kepadatan Penduduk Desa Sidodadi*, (Sidodadi : 02 Oktober 2018), Pukul, 14:37 WIB.

Selain itu pula, agama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka agama yang dianut oleh penduduk Desa Sidodadi memiliki keragaman, hal ini dapat dilihat pada table berikut.²⁹

Tabel V

Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Dilihat Dari Sudut Agamanya

No.	Nama Agama	Jumlah Pemeluk	Jumlah Rumah Ibadah
1	Islam	2.814 Jiwa	18 Buah
2	Kristen	1.662 Jiwa	8 Buah
3	Hindu	6 Jiwa	0 Buah
4	Budha	141 Jiwa	0 Buah
5	Total	4.623 Jiwa	26 Buah

Sumber Data : Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

Berdasarkan data statistik di atas maka jelaslah bahwa Agama Islam merupakan agama mayoritas pemeluknya di Desa Sidodadi dengan jumlah 2.814 jiwa, dan memiliki rumah ibadah Sebanyak 18 buah, dengan rincian 11 buah masjid dan 7 buah mushollah, kemudian pemeluk Agama Kristen berada pada urutan yang ke dua, dengan jumlah pemeluknya 1.662 jiwa.

Disamping pemahaman agama sebagai kebutuhan rohani, masyarakat Desa Sidodadi juga melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka, yaitu sebuah profesi yang mereka geluti dalam keseharian mereka. Dalam

²⁹Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

hal ini mereka melakukan berbagai macam usaha dan menggeluti berbagai macam bentuk pekerjaan, seperti³⁰ :

1. Petani pemilik kebun.
2. Pedagang.
3. Pegawai negeri.
4. Tukang bangunan
5. Buruh pabrik, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.³¹

Tabel VI

Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Dilihat Dari Mata Pencahariannya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	30 Jiwa
2	Pedagang	173 Jiwa
3	Pegawai Negeri	119 Jiwa
4	Tukang Bangunan	111 Jiwa
5	Guru / Dosen	51 Jiwa
6	Bidan / Perawat	50 Jiwa

³⁰Mulyana, *Wawancara Tentang Profesi Masyarakat Desa Sidodadi*, (Sidodadi : 02 Oktober 2018), Pukul, 14:40 WIB.

³¹Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

7	TNI / Polri	61 Jiwa
8	Pensiunan	169 Jiwa
9	Supir Angkutan Umum	80 Jiwa
10	Buruh Pabrik	983 Jiwa
11	Jasa Persewaan	0 Jiwa
12	Pegawai Swasta	39 Jiwa
13	Pengusaha Kecil Menengah	73 Jiwa
14	Total	1.859 Jiwa

Sumber Data : Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru mayoritas masyarakatnya adalah buruh pabrik, dengan jumlah mencapai 983 jiwa, dan yang paling sedikit adalah petaninya, hanya berjumlah 30 jiwa. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk ketika masa kanak-kanaknya dan masa remajanya putus sekolah, yang mana disebabkan dari faktor ekonomi kurang mampu, sedangkan dilihat dari kondisi tanah yang ada di Desa Sidodadi sangatlah layak untuk bercocok tanam, seperti padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Namun karena banyaknya penduduk yang dahulunya putus sekolah dimasa kanak-kanak dan remajanya menyebabkan kurangnya informasi ilmu yang diterima, dan mentalitas untuk melihat masa depan yang cerah, inilah yang menyebabkan mayoritas penduduk Desa Sidodadi berprofesi sebagai buruh pabrik. Dan untuk menanggulangi keadaan ekonomi di Desa Sidodadi ini Bapak Kepala Desa Sidodadi memiliki visi dan misi kedepannya untuk meningkatkan SDM Desa Sidodadi agar menjadi lebih

baik dengan mengembangkan industri rumah tangga, dengan demikian apabila dari segi ekonominya masyarakat sudah memadai maka tingkat masyarakat yang putus pendidikannya dimasa kanak-kanak dan remajanya akan berkurang, dan dengan otomatis tingkat profesi masyarakat sebagai seorang buruh juga akan berkurang.

C. Pendidikan

Dalam kehidupan manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur pola hidup manusia agar dapat tertata dan teratur, tanpa pendidikan kehidupan manusia tidak akan dapat berjalan secara teratur dan orang tersebut tidak akan dapat hidup dengan sukses. Dari segi definisinya sendiri pendidikan merupakan pengajaran yang diselenggarakan langsung di sekolah sebagai pendidikan formal, dan pendidikan juga merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.³²

Kemudian David Riesman menyatakan pendidikan sebagai lembaga yang “*counter-cyclical*” (yang kontra-siklis). Dengan maksud bahwasannya sekolah harus lebih banyak mengemukakan nilai-nilai dan norma-norma yang tidak banyak dikemukakan oleh mayoritas lembaga-lembaga sosial ditengah masyarakat budaya masyarakat. Karena itu sekolah harus lebih banyak berperan sebagai agen pembaharu dan agen yang kreatif, terutama untuk melawan

³²Redja Mudyahardjo, *Sebuah Study Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 7.

rutinisme, kebiasaan yang tergolong kaku dan mekanis, hal-hal yang semu-maya yang banyak terdapat pada zaman dan menyajikan kebenaran kemanfaatan kebaikan.³³

Bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan sewajarnya mereka mempersiapkan diri berada dalam kemajuan, karena bagi masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai pendidikan akan terus mundur dan terbelakang dalam menghadapi kehidupan ini. Karena pendidikan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan setiap pribadi secara optimal dengan tujuan-tujuan sosial yang bersifat manusia seutuhnya yang dapat memainkan peranannya sebagai warga dalam berbagai lingkungan persekutuan hidup dan kelompok sosial³⁴. Maka setiap masyarakat harus membentuk atau mengadakan wadah untuk terlaksana kegiatan pendidikan, sebab tanpa pendidikan masyarakat tidak akan sukses dalam bidang manapun itu.

Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru, menurut hasil pengamatan penulis termasuk masyarakat yang memiliki minat yang baik kepada pendidikan, terbukti dalam setiap tahunnya jumlah anak-anak yang memasuki atau melanjutkan pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan semakin meningkat. Namun disamping hal itu juga masih terdapat dari beberapa masyarakat yang putus pendidikannya disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang mampuh, sehingga jika ditinjau langsung ke lapangan, jumlah masyarakat yang putus pendidikannya mencapai jumlah yang lumayan besar.

³³ Anwar Hafid. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 14.

³⁴ Redja, ... *Sebuah*, ... h. 13.

Pada saat sekarang ini Desa Sidodadi telah memiliki fasilitas pendidikan berupa sekolah yang memadai, hal ini terlihat dengan berdirinya Sekolah Lanjutan Atas meskipun masih dikelola dan berstatus swasta.

Lembaga-lembaga pendidikan di Desa Sidodadi terdiri dari 16 buah Taman Kanak-Kanak, 14 buah Sekolah Dasar / Madrasah Ibtida'iah, 7 buah SLTP / MTS, 1 buah SLTA/MA, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesusahan untuk pergi ke kota untuk melanjutkan sekolah.³⁵

Untuk mengetahui secara keseluruhan jenjang pendidikan masyarakat Desa Sidodadi dapat dilihat pada tabel berikut ini.³⁶

Tabel VI

Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Desa Sidodadi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	654 Jiwa
2	SLTP	285 Jiwa
3	SLTA	978 Jiwa
4	S1 / Diploma	88 Jiwa
5	Putus Sekolah	646 Jiwa
6	Buta Huruf	34 Jiwa
7	Total	2.685 Jiwa

Sumber Data : Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

³⁵Mulyana, *Wawancara Lembaga-Lembaga Pendidikan Di Desa Sidodadi*, (Sidodadi : 02 Oktober 2018), Pukul, 14:49 WIB.

³⁶Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

Dari masing-masing tamatan lembaga pendidikan yang tertera pada tabel di atas, saat ini telah beraktivitas dalam berbagai lapangan pekerjaan, baik sebagai Pegawai Negeri, Swasta, maupun sebagai Buruh Pabrik.

Menurut keterangan KAUR Pemerintahan Desa Sidodadi, masyarakat yang mengalami putus sekolah dan buta huruf pada tabel di atas merupakan dari kurangnya faktor ekonomi yang dialami oleh beberapa masyarakat dan kepala rumah tangga, sehingga dengan berkecil hati banyaknya kepala rumah tangga yang dengan sangat terpaksa harus memberhentikan anak-anak mereka dari pendidikannya³⁷. Hal ini merupakan landasan yang penting bagi Bapak Kepala Desa agar lebih memperhatikan lagi tingkat pendidikan masyarakatnya dan lebih meningkatkan lagi tingkat industri rumah tangga di desa ini, agar tingkat masyarakat yang putus sekolah dan buta huruf dapat diminimalisir. Sebab kemajuan dari suatu bangsa dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat menempuh jenjang pendidikan, sehingga proses pembangunan ditopang dengan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan terampil menuju cita-cita pembangunan.

D. Agama dan Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari agama sudah menjadi kebutuhan bagi manusia untuk mengatur pola kehidupan mereka juga, agar setiap orang dapat hidup dengan tentram dan terkontrol. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberi arah menuju Tuhan sebagai keseimbangan dan kelangsungan

³⁷Mulyana, Wawancara *Penyebab Terhentinya Pendidikan Masyarakat Desa Sidodadi dan Adanya Masyarakat Yang Buta Huruf*, (Sidodadi : 02 Oktober 2018), Pukul, 14:53 WIB.

hidup manusia. Agama juga memiliki fungsi tersendiri bagi manusia baik sebagai fungsi sosial maupun individu. Fungsi tersebut mempunyai kekuatan yang besar dalam menggerakkan komunitas sosial. Sehingga dalam keadaan seperti ini, sulit sekali untuk membedakan antara sesuatu yang murni agama dan interpretasi atas agama. Sesuatu yang murni agama, memiliki nilai-nilai sakralitas yang tinggi dan bersifat absolut. Sedangkan sesuatu yang bersifat dinamis merupakan hasil pemikiran manusia terhadap wahyu-wahyu Tuhan yang maha esa.

Agama juga menempati posisi yang penting dalam kehidupan manusia, karena agama dapat mengarahkan hidup manusia secara baik, selamat dan sentosa mengatur pola hidup *duniawi* dan *ukhrowi* dengan berpedomankan pada hukum-hukum *Syari'at Khaliq* melalui perantaraan utusan-utusanNya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77 :

تَغْرِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصْرِيكَ مِنَ الدُّنْيَا طُ وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ تَبْعًا لِيَلْفُتُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدِبُ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (Kebahagiaan negeri akhirat) dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S Al-Qashash 28 “ 77).³⁸

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta : C.V. Toha Putra, 1983), h. 623.

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa untuk mengatur kehidupan yang baik, hendaklah seimbang antara dunia dan akhirat, karena kehidupan dunia merupakan jembatan untuk menuju kehidupan di akhirat yang kekal.

Agama juga mengajarkan, dan menunjukkan jalan hidup yang lurus dan benar dalam menghadapi berbagai macam liku-liku dalam kehidupan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153 :

أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.* (Q.S. Al-An'am 6 : 153).³⁹

Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru merupakan mayoritas beragama Islam, maka tidaklah heran jika di Desa Sidodadi penduduk yang memeluk Agama Islam lebih mengutamakan kegiatan keagamaan dalam bermasyarakat, suasana yang demikian tampak jelas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penduduk setempat yang sudah menjadi rutinitas bagi mereka, seperti dalam bentuk pengajian yang mereka laksanakan pada setiap minggunya, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan bimbingan penyuluhan agama yang diberikan kepada masyarakat yang baru memeluk Agama Islam (*muallaf*). Dan dari data yang diterima penulis dari KAUR Pemerintahan Desa Sidodadi, mereka yang baru memeluk Agama Islam (*muallaf*) mendapatkan bimbingan berupa

³⁹Departemen,.....*Alquran*,....h. 215.

penyuluhan yang diselenggarakan selama 10 hari, baik itu bimbingan tentang pelaksanaan shalat, bersuci, kebersihan dan bimbingan dalam bergaul kepada sesama muslim, puasa, zakat, dan lain-lain.

Mereka pun mendapatkan bimbingan bukan hanya dari segi teori saja, namun juga bimbingan secara praktik, sehingga dapat memudahkan mereka dalam menerima bimbingan tersebut, dan dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Selanjutnya selain agama, kebudayaan juga menjadi aspek penting dalam masyarakat Desa Sidodadi. Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Antropologi menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.⁴¹

Menurut pengertian tentang kebudayaan di atas, dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak dapat terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Ide dan adat istiadat mengatur dan memeberikan arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran, dan ide-ide, maupun tindakan-tindakan dan karya manusia untuk menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga dpat mempengaruhi pola-pola perbuatannya bahkan juga cara berfikirnya.

Demikian juga dengan masyarakat Desa Sidodadi, karena mayoritas masyarakatnya adalah Suku Jawa, maka kebudayaannya cenderung pada Adat

⁴⁰Mulyana, *Wawancara Respon Pemerintah Desa Terhadap Pemeluk Baru Agama Islam*, (Sidodadi : 02 Oktober 2018), Pukul, 15:09 WIB.

⁴¹ Koentjoro Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986). h. 221.

Istiadat Jawa. Adat Istiadat Jawa ini sering terlihat pada penyambutan Bulan Suci Ramadhan, yang mana setiap masyarakat di Desa Sidodadi ini berkumpul di Masjid untuk menyelenggarakan suatu acara yang di sebut dengan acara punggahan.

Punggahan ini merupakan suatu bentuk rasa syukur setiap masyarakat setempat atas datangnya bulan yang di nanti-nanti oleh seluruh ummat muslimin dan muslimat, yaitu Bulan Suci Ramadhan. Dalam menyelenggarakan acara ini biasanya setiap masyarakat membawa berkat dari rumah masing-masing berupa bentuk makanan, guna untuk dinikmati bersama-sama. Namun selain dalam bentuk rasa syukur masyarakat atas datangnya Bulan Suci Ramadhan, acara punggahan ini dijadikan sebuah rutinitas setiap tahunnya oleh penduduk setempat untuk lebih mempererat lagi silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Selain punggahan juga ada Budaya Jawa yang masih menganut pemikiran dahulu di Desa Sidodadi ini, yaitu Suroan. Suroan ini di ambil dari kata *syuro*, masyarakat Desa Sidodadi selalu mengadakan acara suroan pada hari 10 Muharram setiap tahunnya, mereka mengadakan acara ini berupa bentuk Zikir Akbar yang di isi juga pada rangkaian acara tersebut berupa Siraman Rohani yang di sampaikan oleh Tokoh-Tokoh Agama dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU) yang sengaja di undang. Pelaksanaan pada acara ini biasanya mereka laksanakan di masjid-masjid yang besar, atau di sebuah lapangan yang menampung muatan banyak orang.⁴³

⁴²Ahmad Wijaya, *Wawancara Mengenai Punggahan*, (Sidodadi : 05 Oktober 2018), Pukul, 17:45 WIB.

⁴³Budiono, *Wawancara Mengenai Suroan*, (Sidodadi : 05 Oktober 2018), Pukul, 18:51 WIB.

Selanjutnya kebudayaan yang masih menganut pemikirn dahulu di Desa Sidodadi adalah suatu kebiasaan pengamalan surat Yasin (Wirid Yasin), kegiatan ini di laksanakan oleh mayoritas kalangan masyarakat di Desa Sidodadi dalam siap minggu di tempat-tempat yang sudah di sepakati dan yang di tentukan oleh pengurus kelompok pengajian yang mereka bentuk, selain itu mereka juga menyelenggarakannya pada acara-acara tertentu, seperti pada acara syukuran, dan lain sebagainya, guna lebih mempererat tali silaturrahi di antara mereka.⁴⁴

Kebudayaan dari suku lain tidak nampak menonjol karena pada umumnya kebanyakannya dari mereka selalu berbaur dengan Suku Jawa, sehingga dengan sendirinya adat mereka berkurang sedikit demi sedikit tanpa disadari. Seperti acara pernikahan yang biasanya dilaksanakan oleh Suku Batak selama tiga hari tiga malam, yang sering disebut dengan Acara Margondang, dan acara yang sering juga juga dilaksanakan oleh suku Batak dalam menyambut sebuah pernikahan, atau yang biasa disebut dengan Acara Martahi.

⁴⁴Muhammad Mubarok, *Wawancara Mengenai Yasinan*, (Sidodadi : 06 Oktober 2018), Pukul, 08:09 WIB.

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.⁶⁷

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.⁶⁸

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

⁶⁷ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 93

⁶⁸ M. Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). h. 152

Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

a. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

b. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

c. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara.⁶⁹

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.

⁶⁹ H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX* (Solo, SMP dan MTs, 2006), h. 75

2. Implementasi Kebijakan

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu Rangkaian

tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu;

- a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

- d. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para *stakeholder* tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chif J. O, dengan mengatakan bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau outcome yang biasanya terwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau

lembaga, manfaat atau benefit yang wujud beragam, dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Pemerintah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Kebijaksanaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya,
- b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat,
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada,
- d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal,
- e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya, dan

- f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.⁷⁰

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam proses kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor determinan dalam menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan publik. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh policy makers tidak menjamin kebijakan tersebut pasti berhasil, karena kompleksitasn implementasi dipengarahui oleh berbagai variabel baik variabel individual maupun organisasional. Maka tidak jarang implementasi bermuatan politis dengan adanya intervensi dari barbagai kepentingan.⁷¹

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.⁷²

⁷⁰ Indro Harto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 92-95

⁷¹Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), h. 13.

⁷² Budi Winarno, *Teori dan kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 101-102.

Implementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan, oleh karena itu implementasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan dan implementasinya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan.⁷³

Maka dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurut perspektif agama Islam dalam Alquran surat An-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik.

⁷³ Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 8.

اُدْعُ إِلَىٰ بِلَالِكُمْ مَعَهُ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُمْ
 بِالَّتِي هِيَ اَدْسَرُنْكَ اَلْهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
 وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl, 16:125).⁷⁴

Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw agar mengajak makhluk kepada Allah Swt dengan hukum, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah : “dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah pada mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan.

Firman Allah tersebut memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (*policy*) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu dan prinsipnya masih berbeda dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor politik pada khususnya.

⁷⁴ Junus,....*Tarjamah*,....h. 254

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang di sebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidan kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai “Hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkunganya. Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan mentiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di tawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan /kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaskud.

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu “Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat”.⁷⁵

⁷⁵ David Easton, *The Political System*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1953), h. 129

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu definisi, yaitu :

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindahpindah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak

mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaannya, sehingga nanti pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

4. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non *self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.⁷⁶

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
- b. Menentukan standar pelaksanaan;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode; Tahap III: Merupakan kegiatankegiatan :

- a. Menentukan jadwal;
- b. Melaksanakan pemantauan;

⁷⁶ M. Irfan, Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 102

- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.⁷⁷

B. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Pengertian Industri Kecil Menengah

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Kegiatan industri bisa dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terkait jam kerja dan tempat. Jenis-jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

⁷⁷ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 36

- a. Industri kecil; yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang.
- b. Industri menengah, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang.⁷⁸

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. Industri kecil adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya dan memiliki nilai investasi antara Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b. Industri menengah adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya yang memiliki investasi antara Rp. 200.000.000,- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia

⁷⁸Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2012 (Statistical Yearbook Of Indonesia 2012)*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik (BPS), 2012), h. 287.

Secara historis, industrialisasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya setelah pemerintah kolonial Belanda mengintrodusir sistem tanam paksa pada tahun 1830-an. Pada periode ini sejumlah industri seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan rokok kretek telah ditemukan. Kemudian, industrialisasi modern di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto berkuasa pada pertengahan 1960-an.

Pemerintah Orde Baru secara sengaja merombak struktur ekonomi Indonesia, dari yang berbasis pada sektor pertanian ke yang berbasis pada sektor industri. Usaha pemerintah Orde Baru itu memang tidak sia-sia. Sejak pemerintah Orde Baru telah transformasi yang cukup besar dalam struktur ekonomi Indonesia. Pada awal 1990-an, sumbangan sektor industri terhadap GDP mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Jika sumbangan sektor pertanian kepada GDP turun menjadi 19 %, maka sumbangan sektor industri manufaktur mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat, yaitu 8% menjadi 24%.⁷⁹

Pegembangan dan penerapan perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mendorong seluruh pihak di dunia ini untuk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan secara terpadu dan sistematis. Upaya terpadu dan sistematis tersebut antara lain meliputi kebijakan dan program pemerintah yang kondusif, praktek pengelolaan lingkungan oleh pelaku pembangunan mulai dari kegiatan hulu hingga hilir, penyediaan fasilitas pengelolaan lingkungan yang memadai , dan sebagainya.

⁷⁹Kacung Marijan, *Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Cluster*, (Jurnal Insan Vol. 7 No. 3 Desember 2005), h. 217.

Perkembangan industri yang terus meningkat membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia setiap tahunnya cukup tinggi yaitu dari 43 juta unit usaha pada 2001 menjadi 49,8 juta unit usaha pada 2018 dan jumlah UMKM tersebut merupakan 99,9% dari total pelaku usaha serta berkontribusi terhadap 53,6% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁸⁰

Sebagaimana hadits berbunyi :

تحول مسمر, واعادة لتوزيع المو ارد وكان التحو ل من الناحية
التاريخية من الزراعة الى الصنا, ومن ثمة الى الخمت

Artinya : “*Perkembangan atau peralihan yang berterusan, merangkum pengagihan semula sumber-sumber kekayaan. Perkembangan dari sudut sejarahnya dari era pertanian kepada era industri dan dari tahap itu kepada era perkhidmatan*”. (H.R. Abu Daud).⁸¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa kemakmuran ekonomi dihubungkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi penghimpunan dan kekayaan sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan atau kadar upah para pekerja, produktiviti yang meningkatkan bermakna lebih banyak keuntungan bakal diperoleh, dan secara langsung memperoleh kadar upah dinaikan kuasa beli.

3. Model-Model Pengembangan Industri Kecil Menengah

⁸⁰Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Kekayaan*, (Pekanbaru : Unri Press, 2001), h. 149.

⁸¹ Imam, ...*Shahih*,h. 35

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa terdapat beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:⁸²

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berbagai model pengembangan UMKM telah dikembangkan di negara-negara maju. Jepang misalnya mengembangkan UMKM melalui model “*sub-contracting*”. Artinya perusahaan-perusahaan skala besar

⁸² Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

memberikan order kepada perusahaan-perusahaan skala menengah dan kecil untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak ditanganinya sendiri. Sebagai contoh perusahaan raksasa mobil Toyota atau Mitsubishi hanya merakit mesinnya saja sedangkan pengerjaan dan pembuatan suku cadang disub-kontrakan kepada perusahaan skala kecil. Model kemitraan “*sub-contracting*” demikian memungkinkan perusahaan besar, menengah dan kecil maju secara bersamaan.

Model pengembangan UMKM lainnya adalah melalui model ventura. Model ini dikembangkan untuk membantu UMKM yang baru tumbuh dan mempunyai prospek cerah tetapi tidak mempunyai modal sendiri maupun akses terhadap perbankan untuk mengembangkan usaha karena ketiadaan agunan atau persyaratan administratif lainnya. Dalam hal ini perusahaan modal ventura dapat memperkuat permodalan UMKM melalui penyertaan saham sementara. Setelah UMKM berkembang dan mampu “*go-public*” maka perusahaan modal ventura melakukan divestasi atau menarik kembali sahamnya.⁸³

Pengembangan UMKM juga dapat dilakukan melalui model Inkubator. Melalui model ini UMKM diberdayakan aspek teknologi atau kemampuan bisnisnya untuk jangka waktu tertentu sampai tiba saatnya dilepaskan untuk dapat bersaing secara bebas di pasar. Model yang diperkenalkan di Amerika Serikat ini telah diterapkan di China dan berhasil dengan baik.⁸⁴

⁸³Wulandari, *Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil Berbasis Komoditas Unggulan*, (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1), h. 11

⁸⁴*Ibid*, h. 14

C. Peraturan Pemerintah Terhadap Izin Mendirikan Industri (UMKM)

Tidaklah mudah memberikan definisi untuk menyatakan pengertian perizinan seperti dikemukakan oleh Sajchran Basah. Pendapat yang dikatakan Sajchran Basah sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan Van Der Pot “*Het is uiterst moeilijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*” (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).⁸⁵

Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.⁸⁶

Menurut Utrecht, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁸⁷

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Hal pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali

⁸⁵ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 36

⁸⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h. 187

⁸⁷ *Ibid*, h. 186

diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Konsep yang menjadi dasar pemberian izin adalah sebagai instrument pengawas terhadap perilaku masyarakat. Pemberian izin dapat juga diartikan dengan pembatasan-pembatasan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan. Mengenai perizinan, ranah Hukum Administrasi Negara yang mengaturnya, karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Administrasi Negara belajar tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah. dengan masyarakat.

Pejabat administratif menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal perizinan, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan

suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).⁸⁸

Terkait dengan sebuah industry maupun usaha yang sifatnya kecil dan menengah (UMKM) diperlukan sebuah perizinan untuk mendukung operaasionalnya. Izin usaha yang dibuat harus sesuai dengan jenis dan bidang usaha yang akan dijalankan. Apabila usaha sudah memiliki izin, maka tidak perlu khawatir akan mendapat risiko administratif dari pemerintah dalam menjalankan usaha. Pendirian usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, yaitu meialui Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau Instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Adapun bidang usaha yang memerlukan izin tersebut sebagai berikut⁸⁹ :

1. Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan.
2. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan surat izin usaha kepariwisataan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Usaha bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Ada beberapa surat yang harus dipersiapkan ketika akan membuka usaha sebagai berikut.⁹⁰

⁸⁸ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.155

⁸⁹ *Ibid*, h. 157

⁹⁰ *Ibid*, h. 161-165

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan surat izin yang diberikan menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya. SIUP perusahaan kecil dan menengah ditandatangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama menteri, sedang SIUP untuk perusahaan besar ditandatangani oleh kepala kantor wilayah perdagangan daerah Tingkat I atas nama menteri. Formulir SIUP untuk perusahaan dibedakan warnanya, yaitu warna putih untuk perusahaan kecil, warna biru untuk perusahaan menengah, dan warna kuning untuk perusahaan besar.

Persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai berikut.

- a. Salinan akta pendirian usaha dari notaris.
- b. Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman.
- c. Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat.
- d. Salinan berita negara tentang pendirian perseroan terbatas.
- e. Salinan SITU dari pemerintah daerah.
- f. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan penanggung jawab perusahaan.
- g. Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman/kepala daerah tingkat II.
- h. Pas foto 2 (dua) buah ukuran 3x4 dari penanggung jawab perusahaan.
- i. Salinan surat keputusan direksi dan persetujuan dari dewan komisaris

mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor surat izin usaha

perdagangan dari perusahaan setempat

2. Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan. Izin tempat usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan.

Syarat yang tertuang dalam SITU mengenai keamanan, kesehatan, serta keterlibannya.

a. Keamanan

Ketentuan dalam bidang keamanan sebagai berikut: 1). Dalam perusahaan disediakan alat pemadam kebakaran, 2). Perusahaan yang kegiatannya menyediakan bahan yang mudah terbakar harus menyimpan barang dengan aman, 3). Bangunan terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, 4). Harus mengikuti dan menaati UU keselamatan kerja.

b. Kesehatan

Ketentuan dalam bidang kesehatan, antara lain: 1). Harus memelihara dan menjaga kebersihan dan kesehatan, 2). Harus menyediakan tempat sampah tertutup, 3). Harus mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, 4). Harus menyediakan P3K.

c. Ketertiban

Ketentuan dalam bidang ketertiban, antara lain: 1). Harus menjaga ketertiban, 2). Kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah, 3). Melebihi ketentuan jam kerja, dapat dilakukan dengan izin khusus, 4). Dilarang menyimpan barang di pinggir jalan umum, 5). Penggunaan bangunan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah tempat perusahaan berdomisili.

Seorang wirausahawan jika telah memiliki SITU-HO, maka akan memperoleh manfaat sebagai berikut.

- a. Jika mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan akan lebih mudah memperolehnya.
- b. Jika terjadi penggusuran, maka bisa menjadi sarana untuk meminta ganti rugi.
- c. Memperoleh jaminan perlindungan keamanan.
- d. Bisa digunakan untuk memenuhi syarat ketika mengajukan pinjaman modal di bank.

3. NRP (Nomor Register Perusahaan)

Biasa disebut juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan untuk memperoleh nomor register perusahaan sebagai berikut.

- a. Fotokopi KTP pemilik perusahaan.
- b. Surat izin tempat usaha.
- c. Surat izin usaha perdagangan.
- d. Kartu nomor pokok wajib pajak.

- e. Akte pendirian perusahaan dari notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum.

4. NRB (Nomor Rekening Bank).

Adapun prosedur untuk mendapatkan nomor rekening bank sebagai berikut.

- a. Fotokopi KTP/SIM.
- b. Mengisi formulir kartu contoh tanda tangan.

Persyaratan untuk memparoleh nomor rekening bank sebagai berikut.

- a. Fotokopi kartu contoh tanda tangan.
- b. Tanda setoran.
- c. Lembar pemberitahuan setoran.

5. Izin Gangguan

Izin gangguan dikeluarkan oleh bagian gangguan Pemda setempat. Persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon wirusaha jika akan mendirikan perusahaan, sebagai berikut.

- a. Tempat usaha dan pekarangan yang digunakan sebagai tempat usaha harus selalu bersih.
- b. Diesel atau mesin tidak bising, pondasi bangunan harus kuat menahan getaran.
- c. Menyediakan sarana pengamanan, seperti alat pemadam kebakaran, obat-obatan.

- d. Buka usaha hanya pada jam tertentu dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
- e. Memiliki SIUP.

6. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu.

Persyaratan untuk memperoleh AMDAL sebagai berikut.

- a. Akte pendirian perusahaan.
- b. Surat izin tempat usaha.
- c. Nomor register perusahaan.
- d. Nomor pokok wajib pajak.
- e. Fotokopi KTP pengusaha, pengurus, atau pemilik perusahaan.
- f. Rencana usaha atau kegiatan usaha.
- g. Lokasi dan gambar tanah yang akan didirikan perusahaan.
- h. Sertifikat tanah.

7. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

NPWP merupakan nomor pokok yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wirausahawan yang merupakan wajib pajak. Syarat untuk mendapatkan NPWP sebagai berikut.

- a. Memasukkan surat pemberitahuan ke direktorat jenderal pajak.
- b. Neraca usaha perusahaan atau pembukuan.
- c. Akte pendirian perusahaan.

d. Surat izin tempat usaha (SITU).

D. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UMKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undangundang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian.⁹¹

Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa, bahwa *“Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”*.⁹²

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas.

Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh

⁹¹ Kanaidi, *Koperasi dan UMKM*, (Bandung: Sarijadi, 2014), h. 46

⁹² *Ibid*, h. 47

masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.⁹³

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi.

Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* bagi pelaku UMKM.

Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

⁹³ *Ibid*, h. 63-65

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan Nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan.⁹⁴

Menurut Abdul Rosid: "Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian Nasional, meningkatnya daya saing pengusaha Nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan".⁹⁵

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga Institusi Keuangan, baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian Nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain.

Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan

⁹⁴ Agus Salim, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h. 25

⁹⁵ *Ibid*, h. 37

masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UMKM.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, h. 83-84

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KERUPUK
OPAK DI DESA SIDODADI**

A. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kerupuk Opak

Usaha *Kerupuk Opak* ini merupakan salah satu bagian usaha yang bergerak di bidang industri kecil, dimana usaha ini terletak di Desa Sidodadi kecamatan Biru-biru kota Medan. Usaha ini hanya menghasilkan produk-produk setengah jadi menjadi produk jadi. Produk *kerupuk opak* tersebut di produksi dengan menggunakan jenis-jenis bahan-bahan yang berkualitas. Adapun jenis kerupuk opak dan bagaimana cara pembuatannya dapat di lihat sebagai berikut¹²¹. Adapun jenis-jenis kerupuk opak yaitu:

1. Opak Singkong/Kicimpring Pedas

Merupakan jenis Kerupuk Opak yang terbuat dari bahan-bahan 2kg singkong (parut) secukupnya+garam+daun bawang iris untuk bumbu 4siung bawang merah (ulek) +2 siung bawang putih+5 buah cabe (ulek)+sekucupnya garam dan+tambahkan ketumbar sesuaikan (ulek)+tambahkan air untuk bumbu taburnya+bumbu atum+cabe bubuk kemudian minyak untuk menggoreng. Panaskan panci, kemudian ambil tutupnya dan masukkan adonan sedikit demi sedikit dan bentuk menggunakan garpu sampai tipis, tapi jangan besar-besar ukurannya karena nanti setelah digoreng akan besar. Bisa

¹²¹Sutrisno, *Wawancara Mengenai Pembuatan Kerupuk Opak*, (Sidodadi: 07 Oktober 2018), Pukul 08:03 WIB

menggunakan tutup panci atau baskom agar lebih besar dan muat lebih banyak kemudian seperti di uap diatas panci tunggu beberapa menit. Setelah itu rapikan dan jemur sampai kering dan menggeras hingga siap di goreng, serta mengguunting opak singkongnya, kemudian menggoreng dan membumbui dengan atum dan aida sampai pedas.

2. Opak Singkong/Serminer

Merupakan salah satu jenis kerupuk opak yang terdiri dari bahan-bahan 1 buah singkong di parut, 2 buah cabe rawit, 3 siung bawang putih dan bawang, garam. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu, daun bawang potong kecil-kecil sisihkan, bawang putih dan garam dihaluskan lalu bumbu di bagi 2 bagian dan singkong parutnya juga di bagi 2 bagian. Kemudian campurkan sebagian bumbu halus dan sebagian daun bawang untuk di campur ke yang mau di buat rasa original, dan untuk rasa pedas bisa ditambah cabe yang sudah di haluskan aduk sampai rata. Didihkan air secukupnya dipanci atau diwajan sambil nunggu air mendidih, ambil sedikit adonan terserah mau bikin yang mana dulu lalu camet kan tipis di bagian dalam panci. Setelah dicematkan lalu tutupkan tutup panci ke wajan yang airnya sudah mendidih biarkan sekitar 3 menit. Lalu bukak tutup pancinya dan diamkan/angin-anginkan sebentar setelah itu untuk melepaskan dari tutup panci kerok bagian pinggirnya dengan sendok. Tata di nampan terus selanjutnya di jemur sampai kering.

3. Kecimpring/Opak Singkong

Merupakan jenis kerupuk opak yang terdiri dari 1kg singkong, kupas,

cuci, parut, secukupnya tambahkan garam+5 batang bawang daun, iris kemudian haluskan+3 siung bawang putih+1 sendok ketumbar.

4. Opak Singkong Original Khas Wonosobo

500 gr singkong, potong-potong, lalu kukus selama 3 menit, tambahkan bumbu halus+6 butir bawang putih+1 sendok garam+1 sendok garam+1 sendok merica+1 bungkus royco. Kemudian tumbuk-tumbuk singkong yang sudah di kukus lalu giling menggunakan gilingan daging. Campurkan singkong dengan bumbu halus dan royco, uleni supaya rata. Ambil sejumput adonan lalu gelas tipis-tipis (bisa pake botol atau gelas. Cetak sesuai selera, jemur sampe kering (bisa 2-3 hari). Kemudian goreng dalam minyak panas.

5. Opak Singkong

1 kg singkong+1 sendok ketumbar+1 sendok lada+2 siung bawang putih+1 sendok garam+½ sendok penyedap+2 batang daun seledris diiris kecil-kecil. Kemudian singkong di kupas, cuci bersih, parut, kemudian campurkan dengan bumbu-bumbu yang sudah di haluskan, aduk-aduk sampai rata. Siapkan panci (kalo bisa yang ukurannya besar), isi air $\frac{3}{4}$ nya, kemudian rebus airnya, setelah mendidih kecilkan apinya. Ambil adonan singkong 1 sendok, kemudian letakkan pada bagian dalam tutup panci, dan pipihkan menjadi tipis, begitu seterusnya sampai tutup panci terisi penuh.

6. Opak Singkong Sambal Rujak

1 bungkus kecil asem jawa+1 buah gula merah yang kecil dan tambahkan garam secukupnya+2 ikat opak singkong+25 ml air putih matang.

Kemudian goreng opak singkong di api panas, ulek semua bumbu keculi air, setelah itu beri air sedikit- sedikit jangan terlalu encer dan tidak terlalu kental.

7. Opak Singkong Karamel

1 ikat opak singkong+50 gram gula merah dan tambah secukupnya air untuk membuat caramel+secukupnya minyak goreng.Kemudiansiapkan penggorengan dengan minyak banyak supaya opak bisa tenggelam. Goreng opak lalu tiriskan jangan lama-lama nanti gosong. Setelah semuanya sudah di goreng selanjutnya kita buat karamelnya, siapkan panci, masukkan air, kalau sudah sedikit mendidih masukkan gula aduk sampe kental. Jika sudah kental matikan kompor, lalu ambil opak dan ambil satu sendok karamelnya mulai mengeras dan siap untuk disajikan.

Usaha ini telah berdiri kurang lebih sekitar 20 tahunan yaitu pada tahun 1997 dan sampai sekarang. Pemilik usaha ini adalah pak Sutrisno, awalnya pak Sutrisno menjalankan usaha ini bukanlah disebabkan karena kekurangan ekonomi untuk keluarga atau kebutuhan yang tidak mencukupi akan tetapi usaha ini hanya sebagian dari hobby pak Sutrisno untuk berdagang. Tapi dengan berjalannya waktu pak Sutrisno memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Modal awal pak Sutrisno untuk mendirikan usaha ini adalah sekitar Rp 5.000.000,- dan modal ini hasil dari uang tabungan pak Sutrisno sendiri. Pak Sutrisno memiliki istri dan satu orang anak, Istri pak Sutrisno bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam mengembangkan usahanya pak Sutrisno memiliki 6 orang pekerja yang dapat membantu pak Sutrisno dalam menyelesaikan produk yang dipesan oleh konsumen. Rata-rata pendidikan terakhir para pekerja adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sebagian pekerja juga ada yang berasal dari luar kota. Para pekerja di beri tugas oleh pak Sutrisno sesuai dengan bidangnya masing-masing. Produk-produk yang dijual pak Sutrisno kebanyakan di jual kepada Ibu-ibu yang berumah tangga walaupun sebagian dari produk tersebut juga ada dijual ke pasar atau di terminal. Produk-produk ini diperkenalkan bukanlah dengan melalui iklan, spanduk, reklame ataupun majalah akan tetapi produk-produk yang di jual oleh pak Sutrisno di promosikan melalui satu orang kepada orang yang lain (*Word Of Mouth*).

Sistem pembayaran yang diterapkan dari hasil wawancara dengan pak Hasan kepada konsumen adalah dengan sistem kredit (cicil) dengan jangka waktu yang tidak di tentukan baik dalam hitungan minggu ataupun perbulan. Pembayaran langsung di bayar kepada pak Sutrisno yang juga berperan sebagai manajemen keuangan. Kerupuk Opak Singkong merupakan kegiatan idustri rumah tangga warisan. Dengan kata lain usaha Opak Singkong merupakan usaha yang sudah turun temurun di lakukan Pak Sustrisno. Pada proses pengolahan Singkong menjadi Opak masih menerapkan bentuk kegiatan produksi sederhana.¹²²

Bapak Ridwan Juga menjelaskan hasil produksi yang dipasarkan berupa kerupuk Opak singkong di pasaran memiliki daya minat yang kuat di kalangan

¹²² Hasan, *Wawancara Mengenai Sistem Distribusi Kerupuk Opak*, (Sidodadi: 07 Oktober 2018), Pukul 10:21 WIB

masyarakat, selain harganya murah juga cukup terjangkau dengan ekonomi masyarakat. Apalagi persaingan sangat ketat dengan produksi lainnya, memerlukan kreatifitas yang tinggi agar dapat bersaing dengan pengusaha lainnya.¹²³ Adapun Opak Singkong yang dihasilkan memiliki cita rasa yang beragam yang menarik rasa penasaran masyarakat sehingga kerupuk opak dapat menjadi cemilan bagi masyarakat. Adapun bahan yang dibutuhkan pada proses pembuatan kerupuk opak antara lain:

1. Singkong Segar (Bahan Baku).
2. Bahan Bakar
3. Kayu Bakar
4. Air Untuk Merebus Singkong

Adapun Alat-alat yang digunakan antara lain:

1. Mesin Diesel
2. Mesin Press Untuk Mengeringkan Singkong
3. Mesin Penggiling Ubi Singkong Agar Halus
4. Mesin Pencetak
5. Dandang Untuk Merebus Ubi Singkong.
6. Ayakan untuk menyortir ukuran Opak Singkong
7. Plastik hitam untuk alas penjemur Opak yang telah selesai di cetak.

Proses produksi pengolahan Singkong menjadi Opak Singkong sebagai berikut:

1. Singkong segar dikupas lalu dibersihkan

¹²³ Ridwan, *Wawancara Mengenai Hasil Produksi Opak Yang Dipasarkan*, (Sidodadi: 07 Oktober 2018), Pukul 11:01 WIB

2. Singkong yang telah dikupas dimasukkan ke dalam dandang besar berisi air mendidih dan direbus selama 2-3 jam.
3. Setelah singkong lunak, ditiriskan.
4. Setelah ditiriskan Singkong dimasukkan ke dalam mesin press yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin penggilingan.
5. Pada proses penggilingan Singkong yang telah halus langsung akan tercetak tipis-tipis dengan bentuk bulat dan kotak kecil-kecil.
6. Singkong yang keluar dari cetakan akan langsung ditampung oleh rak-rak penjemuran.
7. Proses penjemuran jika cuaca panas dapat dilakukan 2-3 jam.
8. Setelah Opak Singkong kering dilakukan proses sortasi opak dengan menggunakan ayakan yang masih sederhana. Opak yang keluar dari ayakan artinya Opak yang rusak dan tidak layak untuk di kemas dan dipasarkan.
9. Proses terakhir adalah pengemasan Opak dengan memasukkan Opak ke dalam karung secara sederhana.

Selain itu juga, Bapak Ranto juga menjelaskan tentang peran Pemerintah dalam usaha industri kecil pembuatan kerupuk Opak sangat minim, dan tidak begitu memperhatikan usaha kecil masyarakat yang selama ini masyarakat bangun. Apalagi terkait dengan dana-dana bantuan pemerintah dalam pengembangan usaha ini khususnya tidak lah sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan dan salah satu ciri khas sebuah daerah yang memiliki kultur budaya yang memiliki ciri khas makanan yang seharusnya butuh bantuan semua

pihak dalam mengembangkan usaha kerupuk opak ini.¹²⁴

Rata-rata umur karyawan usaha kerupuk opak singkong pada umumnya adalah dalam usia produktif. Pada kelompok umur dapat diketahui bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah pada umur 31-40 tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 6 orang (40%). Pada umumnya karyawan pak Sutrisno memiliki tingkat pendidikan formal selama 12 tahun atau setara dengan tingkat lulus SLTA. Bahkan terdapat satu orang karyawan yang memiliki pendidikan formal sampai jenjang Diploma. Adapun pendidikan non formal, tidak ada karyawan yang pernah mengikuti pendidikan nonformal. Dengan demikian kebanyakan karyawan pak Sutrisno belum pernah mengikuti penyuluhan, pelatihan ataupun pembinaan dari instansi tertentu. Pengalaman karyawan tersebut dalam pembuatan kerupuk Opak Singkong dalam mengelola usaha ini hampir 16-20 tahun sebanyak 9 orang (30%) karyawan. Dengan demikian jika diperhatikan dari pengalaman karyawan sudah cukup lama dalam mengusahakan kerupuk Opak Singkong. Hal tersebut pada umumnya disebabkan bahwa usaha yang dijalankan adalah merupakan usaha yang di wariskan dan turun temurun. Pada umumnya karyawan pengolah Opak Singkong merupakan kumpulan dari usaha keluarga.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan hubungan keterikatan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi

¹²⁴ Ranto, *Wawancara Mengenai Peran Pemerintah Terhadap Industri*, (Sidodadi: 07 Oktober 2018), Pukul 14:27 WIB

tercapainya suatu bisnis diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktifitas maupun kegiatan bisnis. Adapun struktur organisasi pada Usaha *kerupuk opak* di kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar di bawah ini yaitu¹²⁵:

1. Pemilik Usaha Kerupuk Opak

Pemilik bertanggung jawab penuh atas aset, kewajiban dan modal usaha. Pemilik juga harus memastikan perusahaan beserta pencapaian program kerja dapat berjalan dengan sukses sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pemilik usaha juga bertugas untuk memonitor kinerja dari para manager maupun para bagian kerja, melakukan pembelian bahan baku serta mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional perusahaan .

2. Bagian Keuangan

Bagian keuangan adalah yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pembayaran pajak usaha.

3. Bagian Produksi

Adalah yang mengawasi dan mengontrol kegiatan produksi agar seluruh tahap produksi berjalan teratur sesuai jadwal sehingga pesanan pelanggan atau konsumen dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Bagian produksi membawahi 5 bagian produksi, yaitu :

a. Bagian penghalusan

Yaitu proses penyerutan agar Kerupuk Opak halus dan sama ukuran tebal dan lebarnya dengan mesin *Planner*/Mesin seru.

¹²⁵ Muhammad Ikhwani, Wawancara Mengenai Struktur Organisasi Dalam Perusahaan atau Industri, (Sidodadi: 08 Oktober 2018), Pukul 19:07 WIB

b. Bagian Assembling

Yaitu proses menyetel/ merangkai dari komponen menjadi barang jadi meliputi pembungkusan dan pemasangan hardware atau aksesories lain yang dibutuhkan.

c. Bagian Distribusi

Yaitu proses pengiriman produk ke pasaran atau ke konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri.

d. Bagian Marketing

Adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan pemasaran, serta memberikan pelayanan langsung terhadap konsumen, seperti penerimaan pesanan dan negoisiasi harga.

e. Bagian Distribusi

Adalah yang bertanggung jawab atas pengawasan distribusi barang pesanan konsumen akan dikirim ke berbagai tempat konsumen.

Pentingnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan kerupuk opak Singkong. Usaha pengolahan Opak Singkong menggunakan tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Adapun tenaga kerja laki-laki digunakan pada proses perebusan sampai pengemasan Opak Singkong. Sedangkan tenaga kerja perempuan hanya mengerjakan proses pengupasan Singkong dan penjemuran Opak Singkong. Jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyaknya jumlah produksi Opak Singkong yang akan dihasilkan. Pada produksi Opak Singkong, pengusaha Opak tidak menggunakan tenaga kerja dalam keluarga.

Pemilik usaha Opak hanya mengawasi kegiatan produksi.

C. Persaingan Dengan Pasar Tradisional

Terkait dengan kata persaingan tidak jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama apabila berkenaan dengan sebuah usaha. Sebagaimana halnya yang terjadi di seluruh wilayah mana pun, yaitu apabila seseorang memiliki tekad juang yang tinggi untuk menjadi seorang pengusaha, tentunya dia harus menyiapkan mentalnya untuk bersaing dengan para pengusaha lainnya.

Di Indonesia sendiri memiliki macam ragam usaha, baik berupa usaha kecil dan menengah atau biasa disebut dengan singkatannya, yaitu UMKM, maupun jenis pasar tradisional.

Seperti halnya yang berada di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, terdapat di daerah tersebut sebuah pasar tradisional dan beberapa buah UMKM yang berjenis industri kerupuk opak.

Seperti yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya, yaitu pada biasanya suatu jenis usaha pasti akan bersaing dalam pemasaran produknya dengan usaha yang lain, terutama ke-2 (dua) belah pihak tersebut menjual suatu produk yang serupa, baik dengan cara memberikan *discount* maupun dengan memberikan bonus atau tambahan produk lainnya kepada pelanggan.

Setelah dilakukan terhadap persaingan industri kerupuk opak dengan pasar tradisional yang terdapat di Desa Sidodadi ternyata tidak berdampak sama sekali. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pedagang di

pasar tradisional di daerah tersebut, yaitu Bapak Siswanto.

“saya adalah seorang pedagang pasar tradisional di daerah Desa Sidodadi. Menurut saya bahwa pasar tradisional yang terdapat disini justru terbantu dengan adanya industri kerupuk opak tersebut, sebab pemilik industri menjadikan para pedagang di pasar tradisional ini sebagai marketingnya, yaitu dengan cara menitipkan produknya di tempat kami berdagang, terutama di dagangan saya sendiri terdapat 3 (tiga) jenis keripik opak yang ditipkan oleh beliau”.¹²⁶

Selanjutnya penulis juga menemukan hasil wawancara dari pedagang di pasar tradisional lainnya, yaitu Ibu Rahmi.

“saya sendiri sangat terbantu sekali dengan adanya industri opak ini, karena saya sendiri bisa menambah jenis dagangan saya tanpa memikirkan modalnya. Pemilik usahanya yang dermawan menitipkan beberapa jenis keripiknya untuk dijual, dan masalah pembayarannya dapat saya cicil apabila sudah ada beberapa yang terjual, serta boleh juga diberikan secara sekaligus”.¹²⁷

Hasil wawancara dari ke-2 (dua) informan tersebut sudah menggambarkan tentang bagaimana persaingan pasar tradisional dengan industri keripik opak yang terdapat di Desa Sidodadi, yaitu ke-2 (dua) belah pihak diantaranya memiliki keterkaitan simbiosis mutualisme, yang mana pemilik industri merasa terbantu untuk memasarkan produk-produknya, dan para pedagang di pasar tradisional merasa terbantu karena dapat menambah jenis dagangannya tanpa memikirkan tambahan modal.

D. Faktor-Faktor Penghambat Pemasaran Usaha Industri Kerupuk Opak

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu keberlangsungan usaha. Karena dengan Sumber daya manusia yang baik akan bisa

¹²⁶ Siswanto, *Wawancara Mengenai Persaingan Pasar Tradisional Dengan Industri Keripik Opak di Desa Sidodadi*, (Desa Sidodadi: 3 November 2018), Pukul. 13:05 WIB

¹²⁷ Rahmi, *Wawancara Mengenai Persaingan Pasar Tradisional Dengan Industri Keripik Opak di Desa Sidodadi*, (Desa Sidodadi: 3 November 2018), Pukul. 17:02 WIB

mengatur serta mengendalikan sumber-sumber daya lain yang ada dengan baik pula. Berdasarkan hal ini sebanyak 42,8% responden menyatakan bahwa kondisi sendok industri kecil keripik dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sendok pada industri kecil keripik di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang membutuhkan perhatian yang serius.

Kondisi yang menggambarkan bahwa keadaan sendok pada industri kecil keripik di Desa Sidodadi tidak baik yaitu keterbatasan tenaga terampil pada industri ini, hal ini bisa disebabkan oleh pendidikan para tenaga kerja. Pendidikan tenaga kerja industri keripik rata-rata lulusan SLTA yaitu sebesar 41,2%. Dimana pendidikan dapat meningkatkan mutu suatu tenaga kerja yang akan berakibat pada keberlangsungan usaha, karena sebesar apapun permintaan produk bila tidak ada tenaga kerja yang bisa membuat produk yang diminta tersebut maka tidak mungkin permintaan tersebut dapat terpenuhi. Hal ini menjadi sebab bahwa pengusaha sering tidak bisa memenuhi pesanan pembeli dalam jumlah yang banyak sehingga kepercayaan serta kepuasan pembeli.¹²⁸

Penggunaan tenaga kerja pada industri kecil keripik di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang mayoritas sejumlah 12 orang. Ada pula yang menggunakan tenaga kerja antara 6-7 orang. Hal ini sesuai dengan penggolongan industri menurut penggunaan jumlah tenaga kerja Bapak Azhary yang menyebutkan bahwa penggunaan tenaga kerja pada industri kecil adalah antara 5-19 orang. Adapun dalam industri kecil keripik di Desa Biru-biru kabupaten Deli Serdang, dalam seminggu bekerja selama 6 hari dan tidak

¹²⁸ Muhammad Indra, *Wawancara Mengenai Industri Opak*, (Sidodadi: 08 Oktober 2018), Pukul 08:21 WIB

menentu. Ketidak tentuan ini karena banyak tenaga kerja yang berangkat sesuai banyak sedikitnya pesanan yang ada. Sedangkan lamanya kerja dalam 1 hari antara 5-7 jam.¹²⁹

Kondisi teknologi pada industri kecil keripik di Desa Sidodadi dapat diketahui bahwa sebagian besar kondisi teknologi yang ada tidak baik dengan tingkat persentase 42,8%. Hal ini disebabkan alat yang digunakan kebanyakan masih bersifat tradisional seperti tungku kompor dalam proses menggoreng, penggunaan lilin dalam proses pembungkusan. Penggunaan alat tradisional seperti tungku kompor juga memiliki kegunaan yaitu hasil tumpi lebih renyah dan penggunaan bahan bakar seperti kayu lebih murah daripada menggunakan gas yang tentu saja dapat mengurangi ongkos produksi. Walaupun ada juga yang sudah memakai alat tepat guna seperti kompor gas, alat press dan alat spiner tapi itu hanya sebagian kecil saja.

Selain sendok dan teknologi, modal juga merupakan faktor penting dalam suatu usaha, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa kondisi permodalan pada industri industri kecil keripik di Desa Sidodadi sebagian besar dalam kriteria kurang baik sebesar 52,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi permodalan dalam industri kecil keripik di Desa Sidodadi masih rendah. Walaupun modal bukan faktor satu-satunya dalam menunjang perkembangan usaha tetapi dengan adanya modal yang memadai akan lebih memperlancar dalam proses produksi dan keberlangsungan usaha sehingga usaha akan berjalan

¹²⁹ Azhari, *Wawancara Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja*, (Sidodadi: 08 Oktober 2018), Pukul 11:04 WIB

lancar.¹³⁰

Modal yang diperoleh pengusaha industri kecil keripik di Desa Sidodadi dari modal sendiri. Keputusan pengusaha untuk menggunakan modal pribadi dikarenakan pengusaha kecil pada industri kecil keripik memang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal dari luar selain itu modal yang dipinjamkan dalam jumlah sedikit. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bantuan modal yang diberikan pada industri kecil keripik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bantuan modal dengan cuma-cuma, bantuan modal dengan bunga yang sangat rendah, dan bantuan modal dengan jangka pengembalian yang lama. Biasanya pengusaha yang mendapatkan bantuan ialah pengusaha yang masih baru membuka usahanya dan aktif berhubungan dengan dinas terkait. Bentuk bantuan modal antara lain pemberian hibah uang, pinjaman uang dengan bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian lama, peralatan proses produksi seperti press, spiner dan lain- lain.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai investasi pada industri kecil keripik di Desa Biru-biru Kabupaten Deli Serdang antara Rp 5.000.000 sampai dengan Rp.20.000.000. Sebagian besar memiliki investasi Rp.11.000.000-Rp.15.000.000. Hal ini disebabkan pemilik industri bermacam- macam keadaan, dalam arti masih ada yang baru merintis, ada pula yang sudah lama. Hal ini sesuai dengan kriteria yang digunakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan tingkat investasi yang dimiliki yang dimiliki oleh industri kecil yaitu sebesar 5 juta s/d 200 juta.

¹³⁰ Minarti, *Wawancara Mengenai Modal Industri*, (Sidodadi: 08 Oktober 2018), Pukul 14:03 WIB

Kondisi lain yang dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yaitu bahwa pemasaran yang ada pada industri kecil keripik di Desa Biru-biru Kabupaten Deli Serdang sebagian besar dalam kategori baik sebesar 42,9%. Pemasaran merupakan faktor penting dalam perkembangan usaha, karena sebaik apapun sendok dan teknologi yang ada, dan sebesar apapun modal yang ada apabila pemasaran tidak berjalan, maka mustahil usaha akan mengalami perkembangan yang baik.

Daerah pemasaran industri kecil keripik di Desa Sidodadi mulai dari lokal kabupaten Deli Serdang sendiri seperti Medan, Tanjung Balai, Perbaungan. Luar kabupaten Deli Serdang seperti kota Sidimpuan, Padang, Pekanbaru, dan Aceh. Bahkan sampai luar provinsi seperti Jogjakarta, Jawa Barat, Jakarta dan luar pulau seperti Sumatra dan Kalimantan.

E. Analisis

Dalam sebuah penyusunan perencanaan harus dilakukan suatu analisis, dalam hal ini analisis yang dilakukan berupa analisis SWOT. Analisis ini dilihat dari *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman). Kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pengusaha pada industri kecil industri kecil keripik di Desa Sidodadi sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengusaha tersebut, kelemahan dalam hal ini adalah kelemahan pengusaha sehingga harus diminimalisir dan dihindari oleh pengusaha keripik, peluang dalam hal ini adalah peluang yang berasal dari faktor eksternal atau dari luar perusahaan sehingga bisa dimaksimalkan oleh pengusaha,

sedangkan ancaman dalam hal ini yaitu ancaman yang berasal dari luar sehingga bisa diantisipasi oleh pengusaha.

Berdasarkan analisis matrik eksternal internal, strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan industri kecil keripik di Desa Sidodadi adalah dengan strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Artinya strategi yang diterapkan lebih defensif, yaitu menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit yang di sebabkan oleh hambatan seperti barang mudah rusak, keterbatasan dalam pengiriman dan belum ada kios. Hal yang dapat dilakukan yaitu lebih memperluas pasar sehingga barang lebih terkenal. Peningkatan teknologi tepat guna dan pengembangan kerja sama antar industri.

Berdasarkan analisis matrik SWOT, maka dapat diajukan beberapa strategi pemberdayaan pada industri kecil keripik di Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Pemanfaatan tenaga kerja dari wilayah sekitar untuk meningkatkan produksi.
2. Pengoptimalan pengelolaan usaha dengan menambah modal sehingga barang yang dihasilkan lebih maksimal
3. Pelatihan manajemen kepada pemilik usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan agar usaha berkembang.
4. Perhatian pemerintah maupun lembaga lain dalam hal pemberian bantuan alat produksi (teknologi tepat guna) agar produktivitas meningkat.
5. Mengembangkan wadah kerja sama antar pengusaha yang sudah ada agar bisa memenuhi pesanan pasar dan mengetahui informasi pasar.

6. Bantuan pemerintah dalam bentuk perkuatan modal untuk meningkatkan hasil produksi.
7. Meningkatkan kegiatan promosi produk agar industri keripik dikenal masyarakat secara umum dan menjangkau pasar yang lebih luas
8. Mempertahankan ciri khas cita rasa produk dan meningkatkan kualitas produk agar tetap mampu bersaing dengan produk lain.
9. Menciptakan inovasi dalam pengemasan produk, penambahan jenis produk agar memiliki daya tarik yang tinggi.
10. Mengadakan kerja sama dengan pedagang lain di luar wilayah agar proses pendistribusian lebih luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri kecil dan menengah di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Industri kecil dan menengah keripik opak di Desa Sidodadi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, seperti halnya mengurangi tingkat pengangguran dengan merekrut masyarakat setempat menjadi pekerja di dalamnya.

2. Industri kecil dan menengah keripik opak di Desa Sidodadi tidak menimbulkan persaingan terhadap pasar tradisional yang telah berdiri terlebih dahulu, melainkan menjadi sumber bantuan bagi para pedagang di pasar tradisional.
3. Berkurangnya atau bangkrutnya 2 (dua) buah industri kerupuk opak di Desa Sidodadi dikarenakan kurangnya bahan pokok yang masuk untuk memproduksi kerupuk opak dan kurangnya perhatian pemerintah pada dahulunya terhadap metode pemasaran yang dilakukan oleh pihak dari industri tersebut.

Maka dengan demikian, untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali, menurut pandangan penulis diperlukan adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini, yaitu:

1. Adanya peraturan pemerintah terhadap izin mendirikan sebuah industri/UMKM, seperti SIUP (Surat Izin Perusahaan), NRP (Nomor Register Perusahaan), dan lain sebagainya.
2. Adanya bantuan pemerintah berupa sebuah pelatihan metode pemasaran terhadap para karyawan yang bekerja di industri tersebut, guna untuk meningkatkan omset penjualan.
3. Adanya bantuan pemerintah terhadap penguatan modal, guna untuk mempertahankan pilar industri tersebut, dan tidak menambah tingkat pengangguran di Desa Sidodadi.

Kemudian terkait dengan pemasaran kerupuk opak di Desa Sidodadi, pada bab sebelumnya telah dicantumkan adanya inovasi produk dari kerupuk opak ini, dengan tujuan untuk menambah minat dari para konsumen. Dan juga telah dicantumkan adanya bagian marketing yang bertugas untuk terus mempromosikan produk kerupuk opak tersebut kepada para pemilik usaha kecil maupun ke masyarakat langsung. Namun dalam sebuah pemasaran, tentunya ada saja faktor-faktor yang menghambat perkembangannya, maka untuk menghindari adanya faktor tersebut, perlunya kebijakan pemilik industri dan pemerintah untuk lebih memperhatikan SDM para karyawan yang bekerja di dalamnya.

B. Saran-Saran

Sebuah industri yang berdiri merupakan suatu wadah untuk meningkatkan perekonomian pada suatu daerah yang fungsinya juga merupakan sebuah wadah lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran pada daerah tersebut. Maka dari itu perlunya perhatian yang lebih oleh pemerintah terhadap industri yang berdiri, guna untuk memberikan kontribusi apabila terdapat suatu faktor yang dapat menyebabkan bangkrutnya industri yang telah berdiri. Dengan demikian penulis memberikan saran-saran:

1. Seyogianya pemilik industri untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap SDM para karyawannya.
2. Perlunya perhatian pemerintah terhadap industri yang berdiri.
3. Mahasiswa/i Pemikiran Politik Islam sewajarnya untuk mengetahui tentang apa-pa saja kebijakan yang selayaknya diberikan pemerintah

terhadap UMKM/industri yang telah berdiri, guna untuk membantu industri-industri yang telah berdiri, namun dalam kondisi yang mendekati masa kolaps.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2006).

Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2012 (Statistical Yearbook Of Indonesia 2012)*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik (BPS), 2012).

Chotium, Hetifah Sjaifudian dan Erna Ermawati, *Dimensi Strategi Pengembangan Usaha Kecil*, (Bandung : Yayasan Akatiga, 1994).

Data Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.

Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidodadi Tahun 2016.

Daud, Imam Abu, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta : C.V. Toha Putra, 1983).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi KE-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005).

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957).

- Easton, David, *The Political System*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1953).
- Hafid, Anwar. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Harto, Indro. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- <http://www.depkop.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Juli pukul 14.05 WIB.
- http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pek_0607190_chapter.pdf diunduh 15 Juli pukul 14.45 WIB.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Junus, Mahmud, *Tarjamah Alquran Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983).
- Kanaidi, *Koperasi dan UMKM*, (Bandung: Sarijadi, 2014).
- Marijan, Kacung, *Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Cluster*, (Jurnal Insan Vol. 7 No. 3 Desember 2005).
- Mudyahardjo, Redja, *Sebuah Study Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Ningrat, Koentjoro, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986).
- Nugraha, Safri dkk, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

- Philip, M. Hadjon, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Purwanto, H.S, Sunardi dan Tri, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX*, (Solo, SMP dan MTs, 2006).
- Salim, Agus, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015).
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006).
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Winarno, Budi, *Teori dan kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).
- Wulandari, *Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil Berbasis Komoditas Unggulan*, (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1).
- Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Kekayaan*, (Pekanbaru : Unri Press, 2001).

**Wawancara bersama Sekertaris Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru
sekaligus Foto Bersama**



**Wawancara Kepada Pemilik dan Pekerja di Industri Kecil Dan Menengah
Kerupuk Opak**



Foto Bersama Pemilik Dan Pekerja Industri Kecil Kerupuk Opak



Sistem Penjemuran Kerupuk Opak

